

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi perhatian dalam proses pembangunan di Indonesia. Keberadaan kriminalitas tidak hanya berkaitan dengan keamanan dan penegakan hukum, tetapi juga dapat menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Tingginya tingkat kriminalitas dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti kerugian ekonomi, terganggunya aktivitas masyarakat, serta menurunnya rasa aman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kriminalitas tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan hukum, tetapi juga sebagai permasalahan yang memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang dapat memengaruhi kriminalitas menjadi penting sebagai bagian dari upaya menciptakan kondisi masyarakat yang lebih aman dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Tingkat kriminalitas dapat berkaitan dengan berbagai faktor sosial ekonomi, di antaranya pendidikan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan. Pendidikan berkaitan dengan kemampuan individu dalam memperoleh pekerjaan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sedangkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan menggambarkan kondisi ekonomi dan distribusi kesempatan dalam masyarakat. Perbedaan kondisi sosial ekonomi antarwilayah dapat menyebabkan adanya perbedaan tingkat kriminalitas. Oleh karena itu, ketiga

faktor tersebut penting untuk dikaji dalam memahami kondisi kriminalitas, khususnya pada 10 provinsi yang memiliki tingkat kriminalitas tertinggi di Indonesia.

Menurut Nation & Piliars Kriminalitas merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga masih menghadapi permasalahan kriminalitas yang dapat memengaruhi stabilitas sosial, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kriminalitas tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta dapat menjadi salah satu hambatan dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, permasalahan kriminalitas di Indonesia perlu mendapat perhatian, terutama dengan melihat berbagai faktor sosial ekonomi yang dapat berkaitan dengan perbedaan tingkat kriminalitas antarwilayah (Supriyadi *et al.*, 2024)

Kriminalitas merupakan segala bentuk tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi oleh pihak yang berwenang. Tindakan kriminal tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga dapat berdampak pada komunitas, masyarakat, bahkan negara secara keseluruhan. Selain itu, kriminalitas juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian baik secara ekonomi maupun psikologis, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku, norma sosial, dan nilai-nilai agama dalam suatu negara (Halengkara *et al.*, 2026)

Menurut Erlyna *at al*, (2021) Kriminalitas merupakan segala bentuk pelanggaran terhadap aturan dan norma yang berlaku di masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan sosial serta berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Selain sebagai pelanggaran hukum, kriminalitas juga mencerminkan adanya perilaku menyimpang yang dapat muncul dalam berbagai bentuk kejahatan. Tindakan kriminal dapat berupa pencurian, pembunuhan, penganiayaan, penipuan, penggelapan, maupun pemerasaan yang menimbulkan kerugian bagi individu dan masyarakat. Beragamnya bentuk tindak kejahatan tersebut menunjukkan bahwa kriminalitas memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat (Febbyanto, 2026)

Tindak kejahatan merupakan salah satu ancaman terhadap terciptanya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, terutama di tengah perkembangan dan perubahan nilai-nilai sosial yang terus berlangsung. Mengingat rasa aman merupakan hak setiap warga negara, maka diperlukan peran aktif pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan guna mengurangi tingkat kriminalitas di Indonesia (Putra *et al.*, 2020)

Permasalahan kriminalitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi isu yang kompleks dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi, karena mencerminkan berbagai tantangan yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai bentuk tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, peredaran narkoba, hingga kejahatan terorganisir menunjukkan tren peningkatan

yang cukup tajam. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya rasa aman di kalangan masyarakat, tetapi juga berimplikasi pada terganggunya stabilitas sosial serta melambatnya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, apabila masyarakat terus berada dalam situasi yang diliputi rasa takut terhadap tindakan kriminal dan kekerasan, maka secara bertahap kepercayaan terhadap institusi hukum dan negara berpotensi mengalami penurunan (Susanti *et al.*, 2025)

Berdasarkan penelitian terdahulu, hubungan antara faktor sosial ekonomi dan kriminalitas masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Amilia & Ridwan, (2024), membahas tentang pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Bengkulu pada periode 2018-2024, dengan menggunakan metode regresi data panel melalui pendekatan *Random effect model* (REM). Dalam Penelitiannya menemukan bahwa tingkat pendidikan dan ketimpangan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas, sedangkan tingkat kemiskinan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Juni *et al.*, (2024), membahas tentang Pengaruh Ketimpangan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kriminalitas Di Indonesia Tahun 2013-2023, dengan menggunakan teknik analisis *time series* model linier berganda dengan basis OLS (*Ordinary Least Square*). Dalam Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas, sedangkan ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan. Perbedaan hasil tersebut

menunjukkan bahwa pengaruh tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas masih menunjukkan hasil yang belum konsisten.

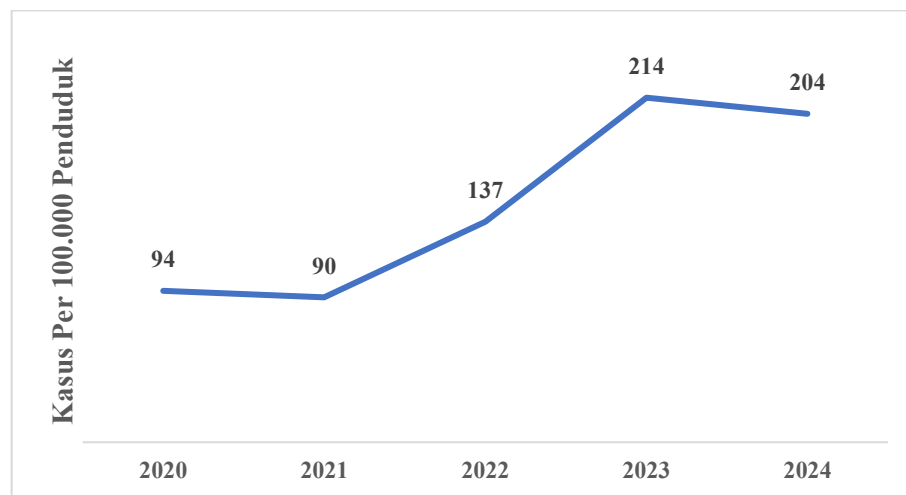
Selain adanya perbedaan hasil penelitian, terdapat pula perbedaan dalam cakupan wilayah dan periode penelitian yang digunakan. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani *et al*, (2022) membahas tentang pengaruh pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan terhadap jumlah kriminalitas di 5 provinsi tertinggi Indonesia pada periode 2018-2022, dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel model *Fixed Effect Model* (FEM). Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yusuf *et al*, (2025) membahas tentang pengaruh faktor sosial yaitu kesenjangan ekonomi, tingkat pengangguran, dan kemiskinan ekonomi terhadap tingkat kriminalitas di kota metropolitan, yang menggunakan model regresi linier. Perbedaan dari penulis ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada jumlah provinsi dan lokasi penelitian serta variabel dalam penelitian.

Berdasarkan sebagian besar penelitian terdahulu terkait kriminalitas di Indonesia telah mengkaji pengaruh faktor sosial ekonomi seperti tingkat pendidikan, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan dengan menggunakan berbagai pendekatan model, seperti *random effect model* (REM), *fixed effect model* (FEM), serta regresi linier. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan wilayah yang hanya berfokus pada daerah tertentu maupun periode waktu yang digunakan. Selain itu, perbedaan penggunaan model analisis menunjukkan belum adanya pendekatan yang konsisten dalam menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut

terhadap tingkat kriminalitas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dan memperluas cakupan wilayah dengan menganalisis 10 provinsi yang memiliki tingkat kriminalitas tinggi di Indonesia selama periode 2020–2024. Pendidikan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan digunakan sebagai variabel yang dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia, dengan menggunakan data yang lebih terbaru sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan relevan dengan kondisi saat ini.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, kriminalitas di Indonesia diartikan dalam bentuk tingkat risiko masyarakat terhadap tindak pidana yang dalam beberapa tahun terakhir masih tergolong cukup tinggi dan menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Fenomena ini masih menjadi permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, pengangguran, serta meningkatnya aktivitas sosial masyarakat. Meskipun berbagai upaya penegakan hukum dan peningkatan keamanan telah dilakukan, tingkat kriminalitas belum sepenuhnya dapat ditekan. Selain itu, tingkat pendidikan juga diduga memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat kriminalitas, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami hubungan antara pendidikan dan risiko terjadinya tindak pidana di Indonesia.

Berikut ini merupakan grafik yang menggambarkan perkembangan tingkat kriminalitas yang diukur berdasarkan rata-rata risiko penduduk terkena tindak pidana per 100.000 penduduk di Indonesia dalam periode tahun 2020 hingga 2024.



Gambar 1 1 Rata-rata Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana per 100.000 Penduduk 2020–2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan risiko penduduk terkena tindak pidana di Indonesia selama periode 2020–2024 cenderung mengalami peningkatan yang cukup tajam. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, risiko penduduk terkena tindak pidana pada tahun 2020 sebesar 94 kasus per 100.000 penduduk, kemudian mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 4 kasus menjadi 90 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2021. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi COVID-19 sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih terbatas.

Namun, pada tahun 2022 risiko kriminalitas mengalami peningkatan sebesar 52 kasus menjadi 137 kasus per 100.000 penduduk. Peningkatan ini dapat

disebabkan oleh mulai pulihnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat setelah pandemi, sehingga interaksi sosial meningkat dan peluang terjadinya tindak kriminal juga menjadi lebih besar. Peningkatan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2023, dimana risiko penduduk terkena tindak pidana meningkat sebesar 56 kasus menjadi 214 kasus per 100.000 penduduk. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan pasca pandemi, tekanan inflasi dan kenaikan harga pokok yang mengakibatkan meningkatnya kejahatan.

Selanjutnya pada tahun 2024, tingkat risiko kriminalitas mengalami penurunan sebesar 5 kasus menjadi 204 kasus per 100.000 penduduk, meskipun angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan periode awal pengamatan. Penurunan tersebut dapat mencerminkan adanya berbagai upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan. Meskipun demikian, kondisi tersebut belum menunjukkan bahwa permasalahan kriminalitas telah sepenuhnya teratasi, karena tingkat risiko pada tahun 2024 masih berada pada angka yang relatif tinggi dibandingkan tahun 2020 dan 2021.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di Indonesia mengalami perubahan dari tahun ke tahun dan belum menunjukkan pola yang konsisten. Peningkatan yang cukup tajam pada periode 2021–2023 menjadi perhatian karena pada periode yang sama kondisi sosial ekonomi masyarakat juga mengalami perubahan. Oleh karena itu, perkembangan kriminalitas tidak hanya perlu dilihat dari perubahan tingkat kriminalitas secara nasional, tetapi juga perlu diperhatikan kaitannya dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat apakah perubahan kondisi sosial ekonomi berjalan searah dengan perubahan tingkat kriminalitas.

Todaro dalam Amilia & Ridwan (2024), mengatakan pendidikan menggambarkan sejauh mana seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kualitas dirinya sebagai bagian dari modal manusia. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan dalam bentuk karakter, etika, serta pemahaman terhadap norma dan aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pendidikan, Individu diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berfikir yang lebih kritis dan rasional dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial.

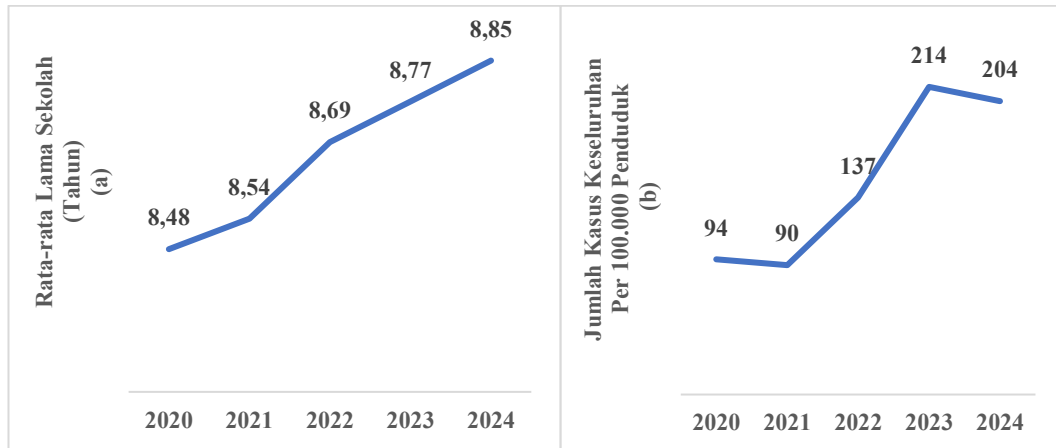
Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya kriminalitas karena pendidikan berperan dalam membentuk pola pikir, perilaku, serta kemampuan individu dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Individu yang memiliki tingkat pendidikan rendah umumnya menghadapi keterbatasan keterampilan dan kesempatan kerja, sehingga lebih rentan mengalami kesulitan ekonomi. Kondisi tersebut dapat mendorong sebagian individu melakukan tindakan yang melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, pendidikan juga meningkatkan pemahaman seseorang terhadap norma sosial dan konsekuensi hukum dari suatu tindakan, sehingga individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran hukum yang

lebih baik dan risiko yang lebih rendah untuk terlibat dalam perilaku kriminal (Ardefa, 2025)

Pendidikan tidak hanya berperan dalam meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga mampu menurunkan kecenderungan seseorang untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Menurut (Machin *at al*, 2025) mengatakan bahwa peningkatan akses pendidikan sejak dini dapat meningkatkan tingkat kelulusan sekolah, peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik, serta menurunkan risiko kejahatan dan penahanan. Pendidikan juga membantu membentuk keterampilan kognitif dan nonkognitif seperti kedisiplinan, pengendalian diri, serta kemampuan mengambil keputusan yang lebih rasional sehingga individu cenderung menghindari perilaku yang melanggar hukum. pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kriminalitas karena dapat meningkatkan kualitas individu serta mengurangi risiko keterlibatan dalam tindakan kriminal dan kejahatan berulang (Ramponi & Tessitore, 2025)

Menurut Hernandez, (2024) pendidikan memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengurangi tingkat kriminalitas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan ekonomi masyarakat. dapat digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin baik kualitas sumber daya manusia yang dimiliki suatu wilayah, sehingga peluang terjadinya tindak kriminalitas cenderung lebih rendah. Oleh karena itu, tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor penting

yang perlu diperhatikan dalam analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kriminalitas (Naeruz *et al.*, 2025)



Gambar 1 2 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) (a) dan Jumlah Kasus Keseluruhan Per 100.000 Penduduk (b) di Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan rata-rata lama sekolah di Indonesia selama periode 2020–2024 yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 tercatat sebesar 8,48 tahun, kemudian meningkat menjadi 8,54 tahun pada 2021, 8,69 tahun pada 2022, 8,77 tahun pada 2023, dan mencapai 8,85 tahun pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan akses pendidikan serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kenaikan rata-rata lama sekolah tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, seperti program wajib belajar, bantuan pendidikan, serta perluasan akses sekolah di berbagai daerah. Selain itu, pemulihan aktivitas pendidikan setelah

pandemi COVID-19 juga turut mendorong peningkatan capaian pendidikan masyarakat. Pada tahun 2020–2021, peningkatan rata-rata lama sekolah masih relatif kecil karena proses pembelajaran masih terdampak pandemi yang menyebabkan pembatasan aktivitas pendidikan. Namun, setelah kondisi mulai normal pada tahun 2022 sebesar 8,69 hingga 8,85 pada tahun 2024, peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi lebih tinggi karena aktivitas pendidikan kembali berjalan secara normal.

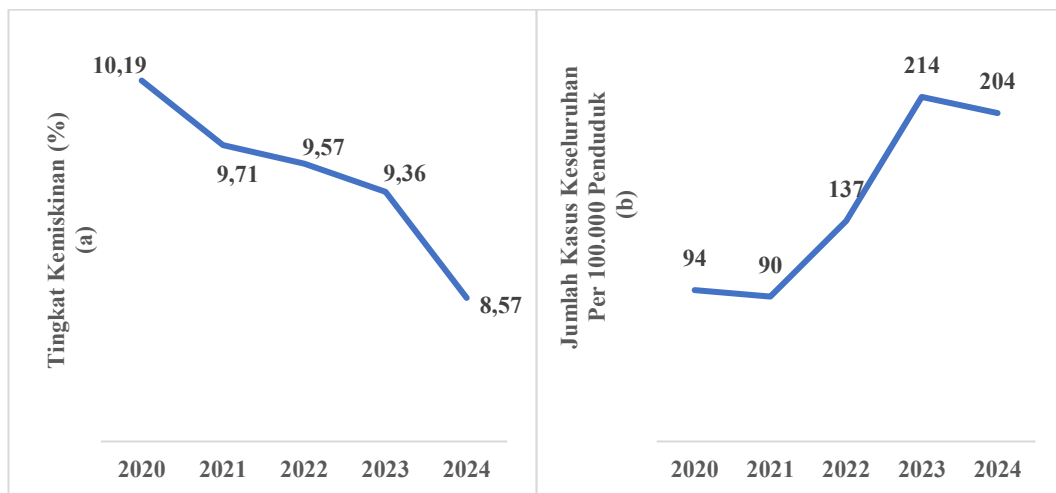
Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan perkembangan kriminalitas pada grafik 1.2 (b), terlihat adanya fenomena yang menarik. Pada periode 2022–2023, rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,69 tahun menjadi 8,77 tahun, namun pada periode yang sama tingkat kriminalitas justru meningkat cukup tajam dari 137 menjadi 214 kasus per 100.000 penduduk atau tumbuh sebesar 56 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah tidak secara langsung diikuti oleh penurunan tingkat kriminalitas pada periode yang sama. Perbedaan arah perkembangan tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji karena secara umum peningkatan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan, namun perkembangan data menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dan kriminalitas dapat terjadi secara bersamaan.

Faktor lain penyebab terjadinya kriminalitas adalah kemiskinan, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang kompleks karena tidak

hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup berbagai keterbatasan yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Menurut Friedman dan Usman dalam Sinaga *et al.*, (2025), kemiskinan berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kesempatan sosial yang dapat menghambat kemampuan individu dalam meningkatkan kesejahteraannya. Sejalan dengan itu, Scott menjelaskan bahwa kemiskinan juga ditandai oleh terbatasnya akses terhadap layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sementara itu, *United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidak mampuan individu untuk memperluas pilihan hidup dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi yang rendah, tetapi juga menunjukkan keterbatasan akses dan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Andre Bayo Ala kemiskinan bersifat multidimensional karena mencakup berbagai kebutuhan dasar manusia yang saling berkaitan. Dalam perspektif kebijakan publik, kemiskinan meliputi aspek primer, seperti keterbatasan kepemilikan aset, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, serta lemahnya akses sekunder berupa keterbatasannya jaringan sosial dan politik. Selain itu, terdapat aspek sekunder berupa keterbatasan jaringan sosial, sumber pembiayaan, dan akses informasi. Berbagai keterbatasan tersebut dapat terlihat dari rendahnya kualitas kesehatan, kurangnya asupan gizi, terbatasnya akses terhadap air bersih, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat (Suci Rahmalia, 2019)

Kemiskinan tidak hanya berdampak pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kriminalitas. Keterbatasan ekonomi yang menyebabkan kebutuhan hidup tidak terpenuhi dengan baik dapat mendorong sebagian individu melakukan tindakan yang melanggar hukum untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Salah satu penyebab kondisi tersebut adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari tingkat pendidikan yang belum memadai, sehingga membatasi peluang memperoleh pekerjaan dan pendapatan yang layak (Rahayu, 2025) Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan dan kriminalitas merupakan dua permasalahan sosial yang saling berkaitan, di mana tekanan ekonomi yang dihadapi individu dapat meningkatkan kecenderungan terjadinya tindak kejahatan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kemiskinan dalam suatu wilayah, semakin besar pula potensi munculnya kriminalitas di masyarakat (Fredella *at al.*,2024; Nisa *et al.*, 2024)



Gambar 1 3 Tingkat Kemiskinan (Persen) (a) dan Jumlah Kasus Keseluruhan Per 100.000 Penduduk (b) di Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber; Badan Pusat Statistik, 2026

Gambar 1.3 menunjukkan perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia selama periode 2020-2024 yang cenderung menurun. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 10,19 persen. Kemudian menurun menjadi 9,71 persen pada tahun 2021 dan kembali turun menjadi 9,57 persen pada tahun 2022. Penurunan berlanjut pada tahun 2023 menjadi 9,36 persen hingga mencapai 8,57 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat pascapandemi dan penurunan presentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

Meskipun demikian, penurunan tingkat kemiskinan ini tidak secara otomatis diikuti oleh penurunan kriminalitas. Kondisi tersebut terlihat pada tahun 2022–2023, ketika tingkat kemiskinan mengalami penurunan, sementara tingkat kriminalitas justru menunjukkan peningkatan yang cukup tajam. Perbedaan arah perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tidak selalu berjalan searah.

Fenomena terjadi pada tahun 2022–2023, di mana tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 2 persen dari 9,54 persen pada tahun 2022 menjadi 9,36 persen pada tahun 2023, namun kriminalitas justru tumbuh dengan tajam sebesar 56 persen dari 190 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2022 menjadi 214 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2023. Perbedaan arah tersebut terjadi pada masa pemulihan pascapandemi COVID-19, ketika aktivitas dan mobilitas masyarakat mulai kembali normal. Kondisi ini diduga dapat meningkatkan peluang terjadinya tindak kriminal seiring meningkatnya aktivitas dan interaksi masyarakat, meskipun

tingkat kemiskinan mengalami penurunan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan kriminalitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi kemiskinan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi lainnya, sehingga hubungan antara kemiskinan dan kriminalitas perlu dikaji lebih lanjut.

Faktor penyebab terjadinya kriminalitas tidak hanya pendidikan, tingkat kemiskinan, tetapi juga ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan merupakan kondisi distribusi pendapatan dalam masyarakat tidak merata sehingga menimbulkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar kelompok penduduk. Di Indonesia, ketimpangan pendapatan masih menjadi tantangan pembangunan meskipun pertumbuhan ekonomi terus peningkatan. Kondisi ini terjadi karena manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, sehingga menciptakan kesenjangan ekonomi antar wilayah maupun antar kelompok penduduk. Kesejahteraan tersebut dapat memperlebar jarak sosial dan ekonomi, mengurangi kesempatan sebagian masyarakat berpendapatan rendah untuk meningkatkan taraf hidup, serta memunculkan berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan menjadi salah satu isu penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan merata (Khairunnissa & Febriani, 2026)

Ketimpangan pendapatan juga dapat menimbulkan berbagai dampak sosial yang serius, salah satunya meningkatnya angka kriminalitas. Menurut (Sugiharti *et al.*, 2022) tingginya ketimpangan ekonomi dapat melemahkan integrasi sosial dan mendorong munculnya perilaku menyimpang akibat tekanan ekonomi yang

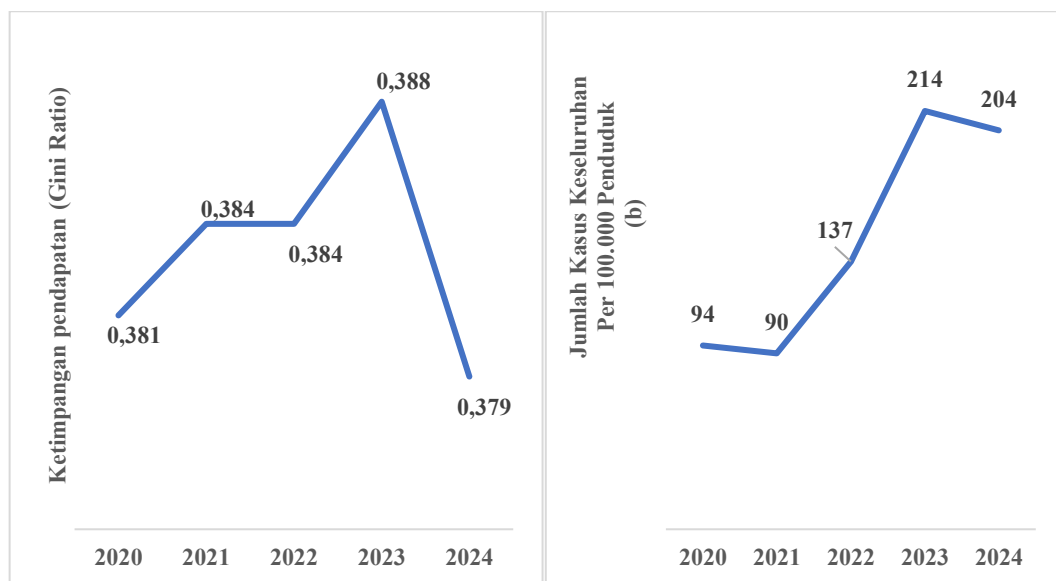
dihadapi sebagian masyarakat. Demikian menurut (Soraya, *et al.*, 2024) distribusi sumber daya yang tidak merata dapat membatasi kesempatan ekonomi masyarakat, sehingga mendorong sebagian individu melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Semakin besar kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi, semakin tinggi pula potensi munculnya tindak kejahatan.

Hubungan tersebut sejalan dengan Teori Ekonomi Kejahatan yang dikemukakan oleh Gary Becker (1968), yang menyatakan bahwa seseorang akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam melakukan suatu tindakan. Ketika peluang ekonomi yang tersedia relatif terbatas, sementara manfaat yang diperoleh dari tindakan kriminal dianggap lebih besar dibandingkan risiko hukuman yang akan diterima, maka kecenderungan untuk melakukan kejahatan menjadi lebih tinggi.

Menurut Armin & Idris, (2020) Ketimpangan pendapatan berkontribusi terhadap peningkatan kriminalitas di Indonesia. Kesenjangan ekonomi yang semakin lebar dapat memunculkan rasa ketidakadilan, kecemburuan sosial, serta tekanan ekonomi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Ketimpangan pendapatan dapat menurunkan kepercayaan antar anggota masyarakat serta melemahkan kontrol sosial yang berfungsi menjaga ketertiban lingkungan. Melemahnya hubungan sosial berpotensi menciptakan kondisi yang lebih rentan terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan (Gretha, 2020)

Ketimpangan pendapatan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi akses masyarakat terhadap tingkat pendidikan,

kesehatan, lapangan pekerjaan, dan berbagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan. Keterbatasan akses tersebut dapat memperbesar kesenjangan sosial dalam masyarakat dan memperkuat berbagai faktor yang berpotensi mendorong terjadinya kriminalitas. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya menekan tingkat kriminalitas serta menciptakan pembangunan yang lebih adil dan (Luca *et al.*, 2019)



Gambar 1 4 Ketimpangan Pendapataan (Gini Ratio) (a) dan Jumlah Kasus Keseluruhan Per 100.000 Penduduk (b) di Indonesia Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2026

Gambar 1.4 diatas menunjukkan dinamika ketimpangan pendapatan di Indonesia yang diukur melalui Gini Ratio selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, nilai Gini Ratio tercatat sebesar 0,381 poin yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan pada kategori sedang. Pada tahun 2021, ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan menjadi 0,384 poin, dan nilai ini relatif bertahan pada tahun 2022 dengan angka yang sama, yaitu 0,384 poin. Peningkatan

ketimpangan pada periode 2020-2021 dapat dikaitkan dengan kondisi perekonomian yang masih terdampak COVID-19, dimana dampak penurunan aktivitas ekonomi tidak dirasakan secara merata seluruh kelompok masyarakat. Ketimpangan pendapatan kembali meningkat pada tahun 2023, di mana Gini Ratio mencapai 0,388 poin, yang merupakan nilai tertinggi selama periode 2020-2024. Peningkatan terjadi karena adanya perbedaan dalam pemulihan pendapatan antar kelompok masyarakat setelah pandemi.

Selanjutnya pada tahun 2024, terjadi perbaikan kondisi sosial ekonomi yang ditunjukkan dengan menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan dan kriminalitas. Ketimpangan pendapatan mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 0,388 poin menjadi 0,379 poin pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya perbaikan distribusi pendapatan di masyarakat mulai lebih merata. Hal ini dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi, peningkatan lapangan kerja, serta kebijakan pemerintah yang mendukung pemulihan dan pemerataan pendapatan. Pada tahun yang sama, kriminalitas juga mengalami penurunan dari 214 pada tahun 2023 menjadi 204 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2024.

Fenomena terjadi pada tahun 2020-2021, nilai Gini Ratio mengalami peningkatan sebesar 0,3 poin atau tumbuh 1 persen dari 0,381 poin pada tahun 2020 menjadi 0,384 poin pada tahun 2021. Namun, kriminalitas mengalami penurunan sebesar 4 persen dari 94 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2021 menjadi 90 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2020. Peningkatan gini ratio disebabkan oleh pasca pandemin COVID-19 yang menyebabkan distribusi pendapatan menjadi

tidak merata, di mana kelompok berpendapatan rendah mengalami penurunan ekonomi yang lebih tajam dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Namun, kriminalitas menalami penurunan dari 94 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2021 menjadi 90 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2020. Penurunan kriminalitas disebabkan oleh terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat selama pandemi. Fenomena menunjukkan adanya perbedaan arah perkembangan antara ketimpangan pendapatan dan kriminalitas, karena peningkatan ketimpangan tidak diikuti oleh peningkatan kriminalitas selama periode 2020-2021.

Namun, fenomena lainnya terdapat pada tahun 2022-2023, gini ratio meningkat sebesar 0,384 point menjadi 0,388 point, sementara kriminalitas juga meningkat cukup tajam dari 137 kasus per 100.000 penduduk menjadi 214 kasus per 100.000 penduduk. Fenomena ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022-2023 peningkatan ketimpangan pendapatan terjadi bersamaan dengan peningkatan kriminalitas. Perbedaan pola perkembangan pada setiap tahunnya menunjukkan bahwa hubungan antara ketimpangan pendapatan dan kriminalitas tidak terlihat sama secara deskriptif, sehingga hubungan kedua variabel ini perlu diuji secara empiris.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa hubungan pendidikan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas masih menunjukkan hasil yang beragam, baik dari arah maupun tingkat signifikansinya serta perbedaan wilayah dan periode penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan cakupan 10 provinsi dengan tingkat kriminalitas

tertinggi di Indonesia selama periode 2020–2024 menggunakan metode regresi data panel. Penelitian ini menguji pendidikan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan secara bersama-sama terhadap kriminalitas, sehingga dapat mempertimbangkan perbedaan karakteristik antarprovinsi dan perubahan kondisi dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan terdapat hasil yang berbeda-beda setiap variabel. Oleh karena itu perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut terhadap penelitian sebelumnya. Peneliti ini menggunakan judul **“Pengaruh Pendidikan, Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kriminalitas Di Indonesia”** agar dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan pendidikan, pengetasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan, serta upaya pencegahan penanggulangan kriminalitas di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seberapa Besar pengaruh Pendidikan terhadap Kriminalitas di Indonesia?
2. Seberapa Besar Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Kriminalitas di Indonesia?
3. Seberapa Besar pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap kriminalitas di Indonesia?

4. Seberapa Besar pengaruh Pendidikan, Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan terhadap Kriminalitas di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap kriminalitas di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap kriminalitas di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam menganalisis ekonomi sosial dan ekonomi pembangunan, melalui mendalam tentang dampak tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Indonesia.

2. Menambah literatur empiris terkait kriminalitas dengan menyajikan data terbaru yang berfungsi sebagai pembaruan bagi penelitian sebelumnya yang terbatas pada variabel atau wilayah spesifik.
3. Memperkuat atau menguji ulang validitas teori Human Capital dan teori Gary Becker, melalui eksplorasi peran faktor sosial-ekonomi dalam mempengaruhi potensi perilaku kriminal di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk merancang dan menyediakan kebijakan yang bertujuan mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya melalui peningkatan kualitas pendidikan, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai upaya menekan tingkat kriminalitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi kriminalitas, mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, dan membantu lembaga sosial serta merancang program pemberdayaan yang lebih efektif.